

**PENGARUH OTONOMI DESA, KOMPETENSI APARATUR DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI KECAMATAN RANGSANG BARAT**

**Fuji Rahayu<sup>1)</sup>, Edfan Darlis<sup>2)</sup>, Al Azhar A<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

[Fujirahayu593@gmail.com](mailto:Fujirahayu593@gmail.com)

*The Influence of Village Autonomy, Competence of Village Apparatus, Community Participation, Transparency, Internal Control System, and Village Government Accounting System on Village Fund Financial Management in Rangsang Barat District*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of village autonomy, village apparatus competence, community participation, transparency, internal control systems, and village government accounting systems on the financial management of village funds in Rangsang Barat District. The independent variables in the study consisted of village autonomy, village apparatus competence, community participation, transparency, internal control systems, and village government accounting systems. While the dependent variable is the financial management of village funds. This type of research is quantitative research with data sources, namely primary data. The instrument used to collect data is a questionnaire, the measurement scale used is the ordinal scale. The sample in this study were 96 respondents. The method used in determining the sample is purposive sampling. The statistical tests used in this research are validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, multiple regression analysis, and coefficient of determination R<sup>2</sup> using Statistical Product and Services Solution (SPSS) application. The results of this study indicate that village autonomy, community participation and transparency have no effect on financial and village management. While the competence of village apparatus, internal control systems, and village government accounting systems affect the financial management of village funds.*

*Keywords: Village Autonomy, Village Apparatus Competence, Community Participation, Transparency, Internal Control System, Village Government Accounting System, Village Fund Financial Management.*

**PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten (Mulyadi, 2018). Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu susunan pemerintahan Republik Indonesia.

Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan penting dalam pembangunan. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa memiliki peran yang strategis dalam membantu pemerintahan daerah dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah wilayahnya.

Pengelolaan keuangan dana desa telah dilimpahkan kepada desa itu sendiri, dikelola secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang desa disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan empat potensi masalah terkait dana desa, menyusul kajian yang telah dilakukan pada 2015. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, yang pertama terkait masalah regulasi. Masalah muncul karena belum lengkapnya regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa.

Masalah regulasi berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.

Ketiga, kajian lembaga antirasuah juga menemukan potensi masalah dalam hal pengawasan. KPK menemukan efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Tak hanya itu, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas. Terakhir, adanya potensi masalah sumber daya manusia (SDM). Hal ini terjadi antara lain tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi maupun fraud memanfaatkan lemahnya aparat

desa. Dari temuan tersebut, KPK merekomendasikan kepada badan atau kementerian terkait untuk merevisi dan atau membuat regulasi baru.

Selanjutnya, fenomena yang terjadi adalah tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kasus yang terjadi yaitu terkait tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa dari tahun 2016-2019, dan juga dana Covid-19 pada tahun 2020. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti diminta untuk terbuka dengan pengalokasian dan pengelolaan dana desa dan juga dana Covid-19. Permintaan itu disampaikan dalam aksi yang digelar oleh Forum Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (FALMA) Kabupaten Kepulauan Meranti yang diketuai oleh Ramlan Abdullah. FALMA mewakili suara rakyat untuk bersuara terkait dugaan tidak terbukanya Pemda masalah dana desa dan dana Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permatasari, dkk (2013) pada Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang menunjukkan bahwa otonomi desa memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Elfin, dkk (2019) di Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa Kompetensi aparatur desa secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Indriani, dkk (2019) di Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Ultafiah (2017) di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat menunjukkan bahwa transparansi

berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Widyatama, dkk (2017) hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian aparatur dari Pemerintah Desa memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kemudian yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Sunarti, dkk (2018) di Desa Pacung menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan desa akan membuat kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

### 2. Otonomi Desa

Otonomi desa menurut Sabtoni (2005, h.16) adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan pemaknaan standar yang formalis dan tidak *clear* dalam kehidupan masyarakat desa.

### 3. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi menurut Robbins (2007:38) adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

### 4. Partisipasi Masyarakat

Menurut Adisasmita (2006:42) partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.

### 5. Transparansi

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

### 6. Sistem Pengendalian Internal

Rai (2008: 283) menyatakan sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya.

### 7. Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pengaruh Otonomi Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rangsang Barat**

Dalam Buku Ajar Politik Pertanahan Menurut (Bayu Suryaningrat 2009:140) otonomi desa adalah otonomi asli, yakni kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang merupakan hak asal usul yang bersumber dari adat istiadat dan melekat sejak terbentuknya desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanura (2015) menunjukkan bahwa otonomi desa berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (APBDes). Maka berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa otonomi desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang ditunjukkan yaitu:

**H1: Otonomi Desa Berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rangsang Barat.**

### **2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rangsang Barat**

Menurut Rudana (2005:6) kompetensi merujuk pada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*) dan kemampuan (*abilities*), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Mada, dkk (2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Dari penjelasan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rangsang Barat**

### **3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rangsang Barat**

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju kearah yang lebih baik (Lomboh, 2015). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriani, dkk (2019) di Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Dari penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya dapat diuraikan hipotesis, sebagai berikut:

**H3: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rangsang Barat**

### **4. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rangsang Barat**

Menurut Didjaja (2003: 261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Dari keterangan teori dan hasil penelitian diperoleh hipotesis. Sebagai berikut:

**H4: Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rangsang Barat**

### **5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rangsang Barat**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses

yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. penelitian yang dilakukan oleh Yudianto, dkk (2018) di Kecamatan Klari, Karawang Timur, Majalaya, dan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Dari keterangan tersebut, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

**H5: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rangsang Barat**

**6. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Menurut Nordiawan (2006) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2018) di Desa Onowaembo, Kecamatan Gunungsitoli menjelaskan bahwa Desa Onowaembo telah menerapkan sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan standar akuntansi.

Berdasarkan teori dan juga hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi desa diperlukan dalam mengelola keuangan desa, agar hasil laporan keuangan desa sesuai dengan standar yang berlaku. Hipotesis yang disimpulkan, sebagai berikut:

**H6: Sistem Akuntansi Pemerintah Desa Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rangsang Barat.**

**METODE PENELITIAN**

**Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kecamatan Rangsang Barat memiliki 12 Desa, dengan ibukota berkedudukan di Desa Bantar. Objek penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Rangsang Barat.

**Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atau objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2012:115). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah desa Se-kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang menerima dana desa, dengan jumlah 12 desa. Sugiyono (2012: 116) menjelaskan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobability sampling, yang kemudian menggunakan metode purposive sampling. Nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:120).

Kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Urusan Keuangan, dan

- Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  3. Satu orang tokoh masyarakat setempat yang berdomisili minimal 5 tahun di wilayah yang bersangkutan, berumur 30 tahun keatas, dan pendidikan terakhir minimal SLTA sederajat.

**Tabel 1 Data Desa di Kecamatan Rangsang Barat**

No	Kode Pos	Desa	Kecamatan	Jumlah Responden
1.	28756	Bantar	Rangsang Barat	8
2.	28756	Permai	Rangsang Barat	8
3.	28756	Anak Setatah	Rangsang Barat	8
4.	28756	Segomeng	Rangsang Barat	8
5.	28756	Sialang Pasung	Rangsang Barat	8
6.	28756	Sungai Cina	Rangsang Barat	8
7.	28756	Lemang	Rangsang Barat	8
8.	28756	Telaga Baru	Rangsang Barat	8
9.	28756	Mekar Baru	Rangsang Barat	8
10.	28756	Melai	Rangsang Barat	8
11.	28756	Bina Maju	Rangsang Barat	8
12.	28756	Bokor	Rangsang Barat	8
<b>Jumlah</b>				<b>96</b>

### Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012: 193). Dengan instrumen penelitian yaitu kuesioner.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi  
Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data dari buku-buku referensi dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Metode kuesioner  
Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari masyarakat

Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dana desa oleh pemerintah setempat.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 1. Variabel Dependen (Y)

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### 2. Variabel Independen (X)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel otonomi desa (X1), kompetensi aparatur desa (X2), partisipasi masyarakat (X3), transparansi (X4), sistem pengendali internal (X5), dan sistem akuntansi pemerintahan desa (X6).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner disebarkan pada 12 kantor desa di Kecamatan Rangsang Barat secara langsung. Dari 96 kuesioner yang disebarkan, terdapat 96 kuesioner juga yang dikembalikan (100%). Berikut tabel rincian pengembalian kuesioner oleh para responden.

**Tabel 2 Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah kuesioner yang disebarkan	96	100%
Jumlah kuesioner yang tidak diambil	0	0%
Jumlah kuesioner yang kembali	96	100%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	96	100%

Sumber: Data olahan (2021)

### Karakteristik Reponden Penelitian

Karakteristik yang diteliti meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, jabatan, dan masa kerja responden. Ringkasan mengenai karakteristik dapat dilihat paada tabel 3.

**Tabel 3 Karakteristik Responden**

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin:		
- Laki-laki	71	74,00 %
- Perempuan	25	26,00 %
Umur:		
- 20-29 Tahun	26	27,08 %
- 30-39 Tahun	39	40,62 %
- 40-49 Tahun	17	17,71 %
- >50 Tahun	16	16,67 %
Jabatan:		
- Kepala Desa	12	12,5 %
- Sekretaris Desa	12	12,5 %
- Kaur Keuangan	12	12,5 %
- Kaur Umum dan Perencanaan	12	12,5 %
- Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Kasi	12	12,5 %
- Pemerintahan	12	12,5 %
- Ketua BPD	12	12,5 %
- Masyarakat	12	12,5 %
Masa Kerja:		
- <1 Tahun	4	4,17 %
- 1-10 Tahun	85	88,54 %
- 10-20 Tahun	3	3,125 %
- 20-30 Tahun	1	1,04 %
- >30 Tahun	1	1,04 %
Pendidikan Terakhir:		
- SMP	2	2,08 %
- SMA	60	62,5 %
- DIPLOMA	8	8,33 %
- S1	26	27,08 %
- S2	0	0 %

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel data menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 71 orang atau 74% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang atau 26%. Kemudian mayoritas aparat Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangsang Barat memiliki rentang umur antara 30-39 tahun yaitu sebanyak 36 orang atau 37,5%. Selanjutnya dari segi jabatan responden meliputi, kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum dan perencanaan, kasi kesejahteraan dan pelayanan, kasi pemerintahan, ketua BPD dan masyarakat setempat. Jumlah responden pada masing-masing jabatan memiliki jumlah yang sama yaitu sebanyak 12

responden dengan persentase 20%. Kemudian masa bekerja yang dimiliki aparat pemerintahan desa <1 tahun sebanyak 4 orang atau 4,17%, 1-10 tahun sebanyak 83 orang atau 86,45%, 10-20 tahun sebanyak 2 orang atau 2,08%, 20-30 tahun sebanyak 4 orang atau 4,17%, dan >30 tahun sebanyak 1 orang atau 1,04%. Selanjutnya diketahui bahwa responden yang memiliki riwayat pendidikan terakhir SMP sebanyak 3 orang atau 3,125%, SMA sebanyak 59 orang atau 61,45%, DIPLOMA sebanyak 8 orang atau 8,33%, S1 sebanyak 26 orang atau 27,08%, sedangkan S2 0 orang atau 0%.

### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan hasil yang didapat dari jawaban responden terhadap indikator pengukur variabel.

**Tabel 4 Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	96	20	48	39.5521	6.03999
aX2	96	12	35	28.1146	4.44112
X3	96	11	30	22.8333	4.11842
X4	96	9	30	24.3958	4.47797
X5	96	15	45	36.8229	6.18316
X6	96	11	30	24.4896	4.19773
Y	96	8	25	21.2292	3.91079
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Data olahan (2021)

Dapat dilihat bahwa variabel otonomi desa memperoleh nilai mean sebesar 39,5521, nilai standar deviasi sebesar 6,03999, nilai maksimum jawaban responden sebesar 48, nilai minimum jawaban responden sebesar 20. Variabel kompetensi aparatur desa memperoleh nilai mean sebesar 28,1146, nilai standar deviasi sebesar 4,44112, nilai maximum jawaban responden sebesar 35, dan nilai minimum jawaban responden sebesar 12. Variabel partisipasi masyarakat memperoleh nilai mean sebesar 22,8333, nilai standar deviasi sebesar 4,11842, nilai maximum jawaban responden sebesar 30, dan nilai minimum jawaban responden sebesar 11. Variabel transparansi memperoleh nilai mean sebesar 24,3958, nilai standar deviasi sebesar 4,47797, nilai maximum jawaban responden sebesar 30, dan nilai minimum jawaban responden sebesar 9. Variabel sistem pengendalian internal memperoleh nilai mean sebesar 36,8229,

nilai standar deviasi sebesar 6,18316, nilai maximum jawaban responden sebesar 45, dan nilai minimum jawaban responden sebesar 15. Variabel sistem akuntansi pemerintahan desa memperoleh nilai mean sebesar 24,4896, nilai standar deviasi sebesar 4,19773, nilai maximum jawaban responden sebesar 30, dan nilai minimum jawaban responden sebesar 11. Variabel pengelolaan keuangan dana desa memperoleh nilai mean sebesar 21,2292, nilai standar deviasi sebesar 3,91079, nilai maximum jawaban responden sebesar 25, dan nilai minimum jawaban responden sebesar 8.

### Hasil Uji Kualitas Data Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas data dapat dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ , dimana  $n$  adalah sampel. Pada penelitian ini diperoleh  $df = 96 - 2 = 94$ . Nilai  $r$  tabel dengan derajat bebas ( $df$ ) 94 adalah sebesar 0,200. Nilai  $r$  hitung yang diperoleh dibandingkan dengan nilai  $r$  tabel untuk menguji validitas data. Jika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Tetapi, jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka item pertanyaan yang digunakan tidak valid.

### Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

**Tabel 5 Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
1.	Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Y1	0,924	0,200	Valid
2.		Y2	0,916	0,200	Valid
3.		Y3	0,933	0,200	Valid
4.		Y4	0,925	0,200	Valid
5.		Y5	0,928	0,200	Valid

**Sumber:** Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dilihat dari tabel 5 diketahui bahwa  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga semua item pernyataan untuk variabel pengelolaan keuangan dana desa dikatakan valid.

### Hasil Uji Validitas Otonomi Desa

**Tabel 6 Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
1.	Otonomi Desa	X1.1	0,700	0,200	Valid
2.		X1.2	0,785	0,200	Valid
3.		X1.3	0,728	0,200	Valid
4.		X1.4	0,643	0,200	Valid
5.		X1.5	0,766	0,200	Valid
6.		X1.6	0,827	0,200	Valid
7.		X1.7	0,713	0,200	Valid
8.		X1.8	0,834	0,200	Valid
9.		X1.9	0,789	0,200	Valid
10.		X1.10	0,751	0,200	Valid

**Sumber:** Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dilihat dari tabel 6 diketahui bahwa  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga semua item pernyataan untuk variabel otonomi desa dikatakan valid.

### Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur Desa

**Tabel 7 Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
1.	Kompetensi Aparatur Desa	X2.1	0,781	0,200	Valid
2.		X2.2	0,855	0,200	Valid
3.		X2.3	0,809	0,200	Valid
4.		X2.4	0,802	0,200	Valid
5.		X2.5	0,792	0,200	Valid
6.		X2.6	0,781	0,200	Valid
7.		X2.7	0,816	0,200	Valid

**Sumber:** Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dapat dilihat pada tabel 5.6 diketahui bahwa  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga semua item pernyataan dikatakan valid.

### Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat

**Tabel 8 Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
1.	Partisipasi Masyarakat	X3.1	0,873	0,200	Valid
2.		X3.2	0,711	0,200	Valid
3.		X3.3	0,781	0,200	Valid
4.		X3.4	0,833	0,200	Valid
5.		X3.5	0,843	0,200	Valid
6.		X3.6	0,737	0,200	Valid

**Sumber:** Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dapat dilihat pada tabel 7 diketahui bahwa  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga semua item pernyataan dikatakan valid.

## Hasil Uji Validitas Transparansi

**Tabel 8 Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
1.	Transparansi	X4.1	0,878	0,200	Valid
2.		X4.2	0,811	0,200	Valid
3.		X4.3	0,853	0,200	Valid
4.		X4.4	0,886	0,200	Valid
5.		X4.5	0,819	0,200	Valid
6.		X4.6	0,859	0,200	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dapat dilihat pada tabel 8 diketahui bahwa r hitung > r tabel sehingga semua item pernyataan dikatakan valid.

## Hasil Uji Validitas sistem Pengendalian Internal

**Tabel 9 Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
1.	Sistem Pengendalian Internal	X5.1	0,814	0,200	Valid
2.		X5.2	0,793	0,200	Valid
3.		X5.3	0,810	0,200	Valid
4.		X5.4	0,740	0,200	Valid
5.		X5.5	0,814	0,200	Valid
6.		X5.6	0,897	0,200	Valid
7.		X5.7	0,771	0,200	Valid
8.		X5.8	0,863	0,200	Valid
9.		X5.9	0,775	0,200	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dapat dilihat pada tabel 9 diketahui bahwa r hitung > r tabel sehingga semua item pernyataan dikatakan valid.

## Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa

**Tabel 10 Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
1.	Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa	X6.1	0,853	0,200	Valid
2.		X6.2	0,828	0,200	Valid
3.		X6.3	0,905	0,200	Valid
4.		X6.4	0,918	0,200	Valid
5.		X6.5	0,873	0,200	Valid
6.		X6.6	0,864	0,200	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dapat dilihat pada tabel 10 diketahui bahwa r hitung > r tabel sehingga semua item pernyataan dikatakan valid.

## Hasil Uji Reliabilitas

Cara mengukur tingkat reliabilitas menggunakan teknik

*cronbach alpha* yaitu membandingkan nilai *alpha* dengan standar koefisien *alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika, nilai *alpha* > 0,70. Jika nilai *alpha* < 0,70 maka tidak reliabel.

**Tabel 11 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Standar Koefisien Alpha	Keterangan
Pengelolaan Keuangan Dana Desa	5	0,955	0,70	Reliabel
Otonomi Desa	10	0,912	0,70	Reliabel
Kompetensi Aparatur Desa	7	0,903	0,70	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	6	0,882	0,70	Reliabel
Transparansi	6	0,922	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	9	0,933	0,70	Reliabel
Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa	6	0,937	0,70	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Pada tabel 11 diatas diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* > nilai standar koefisien *alpha* dari semua variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan semua variabel adalah reliabel.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

### Hasil Uji Normalitas

Pada uji normalitas data dipenelitian ini menggunakan pendekatan *Kolmonogrov-Smirnov Test*. Suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 5%. Berikut hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 12

**Tabel 12 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		96
Normal	Mean	.0000000
Parameters <sup>ab</sup>	Std. Deviation	1.65966275
Most	Absolute	.076
Extreme	Positive	.071
Differences	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.744
Asymp. Sig. (2-tailed)		.638

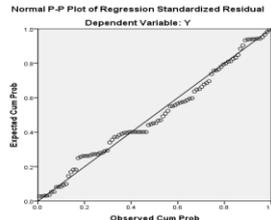
Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Pada tabel 12 dapat diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,638. Hal ini menunjukkan 0,638 > 0,05 sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal. Untuk melihat data berdistribusi normal juga bisa dengan melihat *normal probability plot*. Melalui *normal probability plot* dapat dilihat dengan cara apabila data menyebar

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

**Gambar 1 Grafik Normal P-P Plot of Regression of Standarized Residual**



Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan juga mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi pada penelitian ini sudah memenuhi asumsi normalitas.

**Hasil Uji Multikolinieritas**

Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10 maka terdapat multikolinieritas, tetapi jika nilai tolerance > dari 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 13.

**Tabel 13 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Otonomi Desa (X1)	0.182	5.509	Bebas multikolinieritas
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	0.237	4.217	Bebas multikolinieritas
Partisipasi Masyarakat (X3)	0.294	3.404	Bebas multikolinieritas
Transparansi (X4)	0.149	6.727	Bebas multikolinieritas
Sistem Pengendalian Internal (X5)	0.154	6.474	Bebas multikolinieritas
Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa (X6)	0.297	3.367	Bebas multikolinieritas

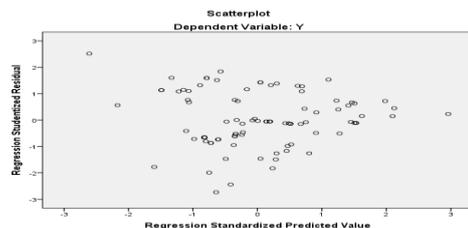
Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Pada tabel 13 dapat diketahui hasil perhitungan data tersebut, untuk seluruh variabel independen menghasilkan nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel independen bebas multikolinieritas.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model regresi dikatakan heteroskedastisitas apabila titik-titik menyebar membentuk suatu pola tertentu (bergelombang, menyebar, kemudian menyempit), maka dapat diidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Akan tetapi, tidak terdapat pola yang jelas, dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 2.

**Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.**



Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, dan juga tersebar di atas dan di bawah angka 0. Maka dapat dikatakan model regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Autokorelasi**

Pada penelitian ini, untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji *Durbin-Watson* (DW Test).

Jika angka yang dihasilkan dari uji *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai +2, maka dapat dikatakan model regresi ini tidak terdapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 14.

**Tabel 14 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Model Summary <sup>b</sup>				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.905 <sup>a</sup>	.820	.808	1.71469	1.630

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dari tabel 14 dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang diperoleh berada diantara -2 sampai +2, yaitu 1.630, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak ada autokorelasi.

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Uji ini juga dihunakan untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hasil uji analisis linear berganda dapat dilihat pada tabel 15.

**Tabel 15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-1.949	1.225		-1.591	.115
Otonomi Desa	.014	.068	.021	.203	.840
Kompetensi Aparatur Desa	.307	.081	.349	3.778	.000
Partisipasi Masyarakat	.040	.079	.042	.507	.613
Transparansi	-.086	.102	-.098	-.843	.402
Sistem Pengendalian Internal	.179	.073	.281	2.451	.016
Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa	.182	.077	.195	2.366	.020

Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

## PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan t hitung dengan tingkat kepercayaan 5% dengan derajat kebebasan (df) = n-k, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel.

Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan t hitung > t tabel maka Ho ditolak, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Nilai t tabel dapat diperoleh dengan rumus berikut.

$$t_{tabel} = n-k-1; \alpha/2$$

$$= 96-6-1; 0,05/2$$

$$= 89; 0,025$$

$$= 1,986$$

### Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yaitu:

H<sub>0</sub> : Otonomi desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa

H<sub>1</sub> : Otonomi desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 16 berikut.

**Tabel 16 Hasil Uji Hipotesis Pertama**

Variabel Independen	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig	Keterangan
Otonomi Desa	0,203	1,986	0,840	Tidak Berpengaruh

pendent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dari tabel 16 diketahui bahwa 0,203 < 1,986 dan sig.t (0,840 > 0,05 dengan demikian disimpulkan H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Kesimpulannya adalah Otonomi Desa tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Rangsang Barat.

Pada hasil penelitian ini, meskipun desa sudah berusaha untuk bersikap mandiri dalam mengelola keuangan dana desa, namun hasilnya belum menunjukkan bahwa para pengelola dana desa mampu mengelola desanya secara mandiri sesuai kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut.

### Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yaitu:

H<sub>0</sub> : Kompetensi Aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa

H<sub>2</sub> : Kompetensi Aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa

Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 17 berikut.

**Tabel 17 Hasil Uji Hipotesis Kedua**

Variabel Independen	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	3,778	1,986	0,000	Berpengaruh

pendent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dapat dilihat pada tabel 17 bahwa 3,778 > 1,986 dan sig.t (0,000) <

0,05 artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Jadi, kesimpulannya adalah kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, para aparatur desa harus mempunyai kemampuan baik fisik maupun dalam pola pikir, sehingga hasil akhir dalam pengelolaan keuangan dana desa berakhir baik dan mampu dipertanggungjawabkan.

#### Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga yaitu:

$H_0$  : Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa

$H_3$  : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa

Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 18 berikut.

**Tabel 18 Hasil Uji Hipotesis Ketiga**

Variabel Independen	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig	Keterangan
Partisipasi Masyarakat	0,507	1,986	0,613	Tidak Berpengaruh

*pendent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa*

**Sumber:** Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dapat dilihat pada tabel 18 bahwa  $0,507 < 1,986$  dan  $\text{sig.t} (0,613) > 0,05$  artinya  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Jadi, kesimpulannya adalah partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Kurangnya kemauan yang dimiliki masyarakat untuk ikut melibatkan diri dalam kegiatan yang diselenggarakan menjadi salah satu pemicu, Hal serupa juga terjadi pada kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, dan lain-lain. Masyarakat juga tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kepentingan bersama guna meningkatkan kemajuan desa, sehingga hasil keputusan tersebut tidak diketahui sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak.

#### Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat yaitu:

$H_0$  : Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa

$H_4$  : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa

Hasil pengujian hipotesis keempat dapat dilihat pada tabel 19 berikut.

**Tabel 19 Hasil Uji Hipotesis Keempat**

Variabel Independen	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig	Keterangan
Transparansi	0,843	1,986	0,402	Tidak Berpengaruh

*pendent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa*

**Sumber:** Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dapat dilihat pada tabel 19 bahwa  $0,843 < 1,986$  dan  $\text{sig.t} (0,402) > 0,05$  artinya  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak. Jadi, kesimpulannya adalah transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya transparansi karena beberapa faaktor. Pertama, berasal dari pemerintah desa yang kurang terbuka terhadap pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai dana desa, kurangnya sarana dan prasarana dalam menyampaikan informasi. banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi mengenai keuangan desa tersebut. Sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan rinci dana desa digunakan untuk apa saja.

#### Hasil Pengujian Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima yaitu:

$H_0$  : Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa

$H_5$  : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa

Hasil pengujian hipotesis kelima dapat dilihat pada tabel 20 berikut.

**Tabel 20 Hasil Uji Hipotesis Kelima**

Variabel Independen	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	2,451	1,986	0,016	Berpengaruh

pendent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dapat dilihat pada tabel 20 bahwa  $2,451 < 1,986$  dan  $\text{sig.t} (0,016) > 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima. Jadi, kesimpulannya adalah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Dalam pengelolaan keuangan dana desa, sistem pengendalian internal harus ada, supaya dapat mengidentifikasi apakah ada resiko dalam setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi pembuatan laporan keuangan, serta memberikan perhatian khusus terhadap resiko yang memberikan pengaruh pada kinerja aparatur desa.

### Hasil Pengujian Hipotesis Keenam

Hipotesis keenam yaitu:

$H_0$  : Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa

$H_6$  : Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa  
Hasil pengujian hipotesis keenam dapat dilihat pada tabel 21 berikut.

Tabel 21 Hasil Uji Hipotesis Keenam

Variabel Independen	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig	Keterangan
Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa	2,366	1,986	0,020	Berpengaruh

pendent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dapat dilihat pada tabel 21 bahwa  $2,366 < 1,986$  dan  $\text{sig.t} (0,020) > 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_6$  diterima. Jadi, kesimpulannya adalah sistem akuntansi pemerintahan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan desa dianggap penting, karena membantu bendahara desa dalam proses pencatatan, agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dipastikan kebenarannya. SAP membantu organisasi pemerintahan untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai anggaran keuangan.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Tabel 22 Hasil Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.905 <sup>a</sup>	.820	.808	1.71469

Sumber: Data Olahan SPSS 25.0, 2021

Dari tabel 22 menunjukkan bahwa R Square bernilai 0,820. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (otonomi desa, kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, transparansi, sistem pengendalian internal, sistem akuntansi pemerintahan desa) terhadap variabel dependen (pengelolaan keuangan dana desa) sebanyak 82% sedangkan sisanya 18% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulannya sebagai berikut.

- Otonomi desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.
- Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.
- Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.
- Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

5. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.
6. Sistem akuntansi pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

organisasi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi) yang bisa menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan dana desa, atau menambahkan variabel moderasi.

### Keterbatasan

Dalam penelitian ini, penulis menyadari terdapat kelemahan dan keterbatasan. Keterbatasan tersebut sebagai berikut.

1. Responden meminta kuesioner untuk ditinggalkan dan diambil kembali sesuai waktu yang sudah ditentukan. Tapi, pada saat pengambilan masih ada beberapa kuesioner yang terbengkalai dan belum diisi. Sehingga penulis harus menunggu lagi dalam waktu yang cukup lama.
2. Responden banyak yang tidak berada di tempat dan susah untuk ditemui, sehingga penulis harus menunggu kembali. Sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia.
3. Hasil penelitian ini hanya dapat digeneralisasikan pada pengelolaan keuangan dana desa pada perangkat di Kecamatan Rangsang Barat saja. Sehingga tidak bisa digeneralisasikan pada perangkat desa untuk kecamatan lain.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan juga berkaitan dengan keterbatasan penulis, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi penulis, dapat dijadikan penambahan wawasan, ilmunya bermanfaat bagi khalayak ramai, dan sebagai bahan tugas akhir kuliah.
2. Bagi aparat desa di Kecamatan Rangsang Barat dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu sumber informasi bagi desa, untuk evaluasi agar bisa meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan atau menambah variabel lain seperti, (komitmen

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Elfin, 2019. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen pada Tugas, Regulasi dan Komunikasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bombana*. Tesis. Kendari: Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Unoversitas Halueleo.
- Hanura, Siti. 2015. *Otonomi Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Provinsi Sulawesi Tenggara*. Tesis. Surakarta; Universitas Slamet Riyadi.
- Indriani, Mirna. 2019. Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7, No. 1.
- Kurniawan. 2018. Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pembnas*. Vol. 4, No. 2.
- Lomboh, Arthur T. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Media Neliti.
- Mada, Sarifuddin, Lintje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel. 2017. Pengaruh Kompetensi Pengelola Aparat Dana

- Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Vol.8. No. 2.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004. Hal. 19.
- Mulyadi, Yadi. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol 5, No 2
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permatasari, Kartika. 2013. Otonomi Desa dalam Pengelolaan Asset Desa (Studi Kasus Pada Desa Siterejo Kecamatan Wegir Kabupaten Malang). Malang: Universitas Brawijaya. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1. No. 6.
- Putra, I Made Yoga Darma, dan Ni Ketut Rasmini. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Bali: Universitas Udayana. *E-Journal Akuntansi*. Vol. 28. No. 1
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep Praktik Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P. 2007. *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks. Gramedia. Edisi Kesepuluh.
- Rudana, N. 2005. *Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Sabtoni, Anang, dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, Nyoman. 2018. Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Vol. 8. No. 1.
- Widyatama, Arif, dkk. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. STIE Panca Bhakti Palu.
- Yudianto, Ivan, dan Ekasari Sugiarti. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya, dan Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)* 17(1): 1-18.